

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di Desa Ella Hulu dan Dinas Perkebunan Kecamatan Menukung dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan empat faktor tentang Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ella Hulu.

1.1.Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1.1 Rendahnya Kinerja Petugas Lapangan

Petugas lapangan memiliki tugas dan peran dalam membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Melakukan komunikasi dan relasi serta berinteraksi dengan masyarakat desa agar tercipta kerjasama yang baik antara petugas lapangan dan juga masyarakat desa.

Adanya petugas lapangan harusnya bisa mempermudah masyarakat dalam mengelola program. Akan tetapi petugas lapangan yang diharapkan masyarakat dapat membantu justru tidak pernah datang untuk memantau jalannya program tersebut. Akibatnya masyarakat mengalami kesulitan dalam memilih lokasi yang akan dijadikan lahan sawah. Seperti yang diungkapkan oleh Abet, salah satu narasumber dalam penelitian ini :

“ Dari awal serah terima program, tidak ada satu petugas pun yang datang mengawasi atau memantau ke lapangan. Sudah tanda tangan surat serah terima dan lain-lain, ya sudah. Tidak ada tinjau lanjut lagi dari pemerintahnya”

Berdasarkan data di atas seharusnya ada petugas yang didatangkan guna memantau berjalannya program tersebut, tetapi tidak ada yang datang ke lapangan. Padahal dengan adanya petugas lapangan menjadi harapan bagi para kelompok tani dalam membantu meningkatkan keberhasilan dari program tersebut. tapi nyatanya tidak ada petugas lapangan

yang datang memantau jalannya program tersebut. hal itu mengakibatkan program tersebut gagal dikarenakan masyarakat desa yang belum cukup terampil sehingga perlu didampingi langsung oleh petugas lapangan saat menjalankan program tersebut. hal tersebut kemudian diperkuat oleh Usman salah satu narasumber yang mengatakan :

“ Kami tidak ada melihat petugas lapangan yang datang ke Desa, bahkan saat kami pertama kali membuka lahan itu seharusnya ada petugas lapangan yang mendampingi.”

Seperti ungkapan salah satu informan bahwa tidak ada petugas lapangan yang datang untuk mengawasi dan mendampingi saat pembukaan lahan pertama kali. Pemerintah hanya melakukan serah terima program saja, selanjutnya mereka seperti tidak serius dalam menangani program tersebut. hal itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar program tersebut berjalan dengan baik. Dalam hal ini sudah jelas bahwa petugas lapangan tidak melakukan tugas dan perannya sebagai seorang yang sudah diamanatkan pemerintah untuk selalu membantu dan mengayomi masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa dalam menjalankan program pemberdayaan.

Sementara dari pihak pemerintah mengatakan bahwa alasan mereka tidak melakukan kunjungan dikarena kondisi jalan yang rusak akibat hujan, sehingga akses jalan menuju Desa Ella Hulu cukup sulit untuk dijangkau menyulitkan para petugas yang hendak memantau berjalannya program pemberdayaan didesa Ella Hulu. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi petugas lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi. Seperti yang dikatakan oleh bapak Wito Mulyono, S.IP, MM menyatakan :

“Bukannya tidak ada peninjauan lokasi, tetapi dikarenakan lokasi yang sulit untuk dijangkau. Seperti yang diketahui jalan menuju Desa Ella Hulu kan tidak mudah untuk dilalui, apalagi jika musim penghujan, jalannya saja sudah tergenang lumpur dimana-mana.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018).

Berdasarkan data wawancara diatas menyatakan bahwa akses jalan menuju desa Ella Hulu sulit untuk dilalui sehingga menyulitkan petugas lapangan untuk melihat lokasi, apalagi saat musim hujan jalan menuju lokasi tersebut tergenang air, sehingga membuat jalanan

menjadi berlumpur dan membuat transportasi darat susah untuk melewati jalan tersebut. Contohnya mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi tersebut dikarenakan ban mobil yang tergenang lumpur. Dikarenakan akses jalan yang sulit ditempuh, pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi yang akan dijadikan lahan sawah.

Pada saat musim hujan akses jalan menuju desa Ella Hulu menjadi berlumpur hal itu dikarena kondisi jalan yang memang sudah rusak parah dan tidak diaspal. Sehingga tidak sedikit kendaraan yang terjebak akibat jalan yang berlumpur tersebut. Kondisi jalan seperti itu menjadi kendala bagi pemerintah untuk melakukan kunjungan ke Desa Ella hulu.

Gambar 3.1 Kondisi Jalan Yang Rusak Akibat Hujan



Sumber : berdasarkan temuan penulis

Gambar di atas menunjukkan akses jalan menuju Desa Ella Hulu yang rusak akibat hujan jalan menjadi berlumpur dan licin. Sehingga menyebabkan akses jalan menuju desa tersebut sulit untuk di tempuh apalagi saat musim penghujan bahkan lebih parah lagi jalan tersebut tidak bisa di akses. Hal tersebut diaku pihak dinas menyulitkan bagi mereka untuk melakukan peninjauan lebih lanjut ke lokasi lahan persawahan.

Tetapi walaupun dengan adanya jalan yang sulit dilalui tidak menjadikan hal tersebut sebagai hambatan, karena akses ke Desa Ella Hulu tidak hanya bisa melalui transportasi darat melainkan bisa melalui sungai. Seharusnya petugas lapangan tetap harus melaksanakan tugas dan perannya untuk hadir saat masyarakat desa mengadakan pertemuan untuk membantu mereka menjelaskan dan mengambil keputusan agar tercapai keberhasilan. Petugas lapangan harusnya hadir saat diadakan pertemuan guna membantu masyarakat desa dalam mengambil keputusan serta mendorong masyarakat untuk memberikan yang terbaik pada waktu bekerja dan berinteraksi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Peran petugas lapangan disini dinilai tidak maksimal dan bahkan tidak nampak dalam melakukan tugasnya, padahal seharusnya petugas lapangan harus selalu siap sedia dalam membantu masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat desa. Padahal dengan adanya fasilitator / petugas itu sangat membantu masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

Menurut Muslim (2017) sikap petugas lapangan yang enggan untuk turun ke lapangan langsung menunjukkan betapa rendahnya kinerja seorang fasilitator karena ia tidak memiliki kemampuan untuk dalam menjalankan tugas dan perannya yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Rendahnya kinerja petugas lapangan dapat ditandai dengan beberapa hal yaitu enggan untuk turun ke lapangan untuk meninjau lokasi, ketidak-sediaan dalam menjalin kerja sama dan tinggal dalam masyarakat desa, tidak mampu untuk merasakan kehadirannya dalam menjalankan tugas yang sangat dibutuhkan masyarakat desa, tidak mampu untuk menjalin relasi dan melakukan pemantauan (Muslim, 2017). Hasilnya kegiatan pemberdayaan KBR yang dilaksanakan tidak dapat merangsang kehidupan masyarakat desa yang miskin. Kurangnya peran aktif dari petugas lapangan dalam membantu masyarakat membuktikan sikap petugas yang tidak bertanggungjawab pada tugas dan perannya sebagai petugas lapangan yang diharuskan membimbing masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Kejadian di atas yang diteliti oleh Aziz Muslim (2017) tentang analisis kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat semakin menguatkan temuan penulis bahwa sikap petugas lapangan yang dinilai tidak nampak serius dalam membantu masyarakat miskin berpengaruh pada kegagalan program pemberdayaan. Petugas lapangan dinilai telah gagal melakukan perannya untuk membantu

masyarakat. Padahal seharusnya dengan hadirnya petugas lapangan dapat membantu masyarakat desa dalam memecahkan masalah.

3.1.2 Pemilihan lokasi lahan yang tidak tepat

Pemilihan lokasi yang tidak tepat bisa menyebabkan program mengalami kegagalan, hal itu dikarenakan tidak ada tempat pembuangan air. Hal itu tentu menjadi penghambat keberhasilan suatu program. Pemilihan lokasi lahan sawah di desa ella hulu dikatakan kurang tepat karena lokasi sawah tersebut yang jika musim kemarau mengakibatkan sawah tersebut mengalami kekeringan, tetapi sebaliknya jika sedang musim hujan maka sawah di lokasi tersebut akan terendam banjir sementara sawah tersebut tidak memiliki bendungan untuk menampung aliran air.

Hal tersebut mengakibatkan banyak padi yang tidak dapat dipanen. Kondisi sawah yang kini terendam banjir sangat memprihatinkan dan membuat para petani rugi karena mereka tidak bisa menikmati hasil panen. Menurut Usman salah satu informan dari Kelompok Tani yang mengelola sawah tersebut mengatakan:

“ Kami pikir dengan memilih lahan sawah yang jauh dari pemukiman akan mendatangkan keberhasilan, tapi kami tidak tau kalau daerah yang kami jadikan lahan sawah malah rentan terkena banjir. Dari awal pengajuan proposal pun pihak dinas tidak ada melakukan peninjauan lokasi yang akan dijadikan lahan tersebut.”

Berdasarkan data wawancara informan di atas pihak dinas tidak melakukan peninjauan ataupun mengunjungi lokasi yang akan dijadikan tempat untuk lahan sawah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai lahan tersebut sesuai atau tidak untuk dijadikan lahan sawah. Pada musim penghujan maka lahan sawah akan mengalami kebanjiran sehingga mengakibatkan gagal panen. Abet salah satu anggota kelompok tani mengatakan :

“seharusnya jika ada petugas lapangan yang datang untuk melihat lokasi pasti tidak akan seperti ini. Mereka kan yang lebih paham mana daerah yang subur yang tepat untuk dijadikan lahan sawah. Sehingga tidak ada masalah seperti ini.”

Dari wawancara diatas pihak desa menyesalkan petugas lapangan yang tidak melakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat apakah lahan tersebut cocok atau tidak untuk

dijadikan sawah. Karena masyarakat desa tidak paham dalam menentukan tanah yang subur, yang cocok untuk dijadikan lahan sawah atau yang tidak mudah terendam banjir jika saat sedang hujan . kondisi sawah yang terendam banjir membuat para petani kehilangan mata pencaharian mereka. Karena memang masyarakat Desa Ella Hulu sangat mengandalkan bertani sebagai hasil pendapatan mereka.

Jika pemerintah mengadakan peninjauan lokasi tentu pemilihan sasaran program tidak akan berujung pada kesalahan pemilihan lokasi. Dikarenakan tidak ada peninjauan lokasi maka masyarakat desa sendrihlah yang menentukan lokasi lahan. Namun, hal tersebut ternyata mengakibatkan kesalahan dalam memilih lokasi sasaran program. seperti pada gambar dibawah yang menunjukkan kondisi lahan sawah yang terendam banjir akibat kesalahan dalam memilih lokasi lahan.

Gambar 3.2. Kondisi Sawah Yang Terendam Banjir



sumber : berdasarkan penemuan penulis

Foto di atas adalah keadaan sawah terbaru tahun 2018 yang menunjukkan sawah tersebut tergenang air dikarenakan hujan sehingga menyebabkan petani tidak bisa panen dan

memberikan kerugian bagi para petani di desa Ella Hulu. Banyak sawah di desa yang mengalami hal serupa dikarenakan pemilihan lokasi lahan yang tidak sesuai untuk dijadikan lahan sawah sehingga pada saat musim penghujan sawah-sawah di desa Ella Hulu terendam banjir seperti pada gambar diatas.

Jelas saja masyarakat desa yang memiliki pendidikan rendah tentu tidak tahu bagaimana cara menentukan kondisi tanah yang cocok dan tanah mana yang subur untuk dijadikan lahan sawah. Masyarakat desa hanya mengandalkan sawah sebagai salah satu sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat desa khususnya di Desa Ella Hulu yang sejatinya mengandalkan kegiatan bertani sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Para petani menyangkan kondisi sawah yang kini sudah terendam banjir itu. Dikarenakan sawah yang banjir para petani jadi tidak bisa memanen hasil sawah mereka. Padahal hidup mereka bergantung pada kegiatan bertani. Karena masyarakat desa sebagian besar pekerjaannya adalah bertani yang merupakan mata pencaharian mereka.

Untuk memilih suatu lahan yang cocok untuk di jadikan sebagai sasaran program tentu itu merupakan tugas dari pemerintah yang harus turun langsung untuk meninjau lokasi apakah sesuai untuk sasaran program atau tidak, bukan hanya dengan melihat berdasarkan data saja (Nohor, 2010). Penelitian yang telah dilakukan oleh Nohor (2010) tentang faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pengelolaan sistem penyediaan air minum di Desa Wulan dan Teransing Kabupaten Barito Timur menguatkan temuan penulis bahwa sebelum menentukan lokasi sasaran pemerintah harus terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi guna memastikan apakah lahan tersebut sudah cocok atau sesuai untuk dijadikan sasaran lokasi program.

Seorang aparat pemerintah juga harus memiliki kemampuan untuk menentukan lokasi sasaran yang tepat untuk dijadikan sebagai sasaran program, dengan begitu baru akan memenuhi target keberhasilan suatu program (Nohor, 2010). Tentu saja untuk mengetahui

apakah lahan tersebut sudah tepat sasaran pihak pemerintah harus datang langsung melihat lokasi tersebut. setelah itu baru diputuskan apakah lahan tersebut sesuai sasaran atau tidak.

3.1.3 Kurangnya bantuan fasilitas dari Pemerintah

Bantuan fasilitas yang diharapkan disini adalah mengadakan penyuluhan atau sosialisasi serta pelatihan bagi masyarakat desa sebelum menjalankan program dengan harapan masyarakatnya mengerti tentang bagaimana mengolah program tersebut dengan baik dan benar. Tetapi dari pemerintah hanya memberikan bantuan berupa bibit dan pupuk, tanpa memberikan arahan tentang bagaimana cara memilihin lokasi lahan, cara menanam bibit yang baik dan benar. Sehingga program KBR yang diharapkan keberhasilannya sangat jauh dari kata berhasil. Penyuluhan atau pelatihan sebelum melaksanakan program dilakukan oleh pemerintah sebelum memulai program agar masyarakat memahami apa itu KBR dan bagaimana cara mengolahnya menjadi tepat sasaran.

Pemberian pupuk sangat penting dilakukan karena agar karet dikelilingi oleh semak belukar yang bisa menghambat perkembangan karet. Tentu tidak hanya dengan memberikan pupuk, tetapi dengan mengetahui pupuk yang cocok untuk setiap jenis tanaman juga penting dilakukan. Pemberian pupuk sendiri berguna untuk melindungi karet dari rumput liar yang mengelilingi karet. Namun jika tidak diberi pupuk maka akan terjadi seperti pada gambar dibawah yang menunjukkan kondisi karet yang tidak diberi pupuk. Akibatnya karet tersebut ditumbuhi semak belukar yang menghambat tumbuh kembang karet tersebut, seperti pada gambar dibawah.

Gambar 3.3 Kondisi Karet Yang Tidak Diberi Pupuk



Sumber : berdasarkan temuan penulis

Gambar di atas menunjukkan kondisi karet yang mati akibat tidak diberi pupuk sehingga banyak tanaman liar yang tumbuh disekeliling karet seperti pada gambar di atas. Pentingnya pupuk pada pertumbuhan karet sangat penting karena jika sering diberi pupuk maka tumbuhan karet pada daunnya akan berwarna hijau dan mengeluarkan getah karet yang segar dan terhindar dari tanaman liar yang dapat mengganggu atau bahkan menghambat pertumbuhan karet itu. Sementara jenis pupuk bermacam-macam jenis dan fungsinya, sesuai dengan jenis tanamannya. Dengan tingkat pendidikan yang rendah tentu sulit bagi masyarakat desa untuk mengetahui mana pupuk yang cocok dan bagaimana cara mengelolanya. Penyuluhan disini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait sasaran program, seharusnya penting untuk dilakukan guna memberi pemahaman pada masyarakat desa. Pemerintah yang tidak memberikan penyuluhan pada masyarakat sehingga masyarakat tidak paham tentang pupuk yang cocok untuk karet dan bagaimana pengelolaannya. Seperti pada wawancara dengan salah satu kelompok tani Usman mengatakan :

“Kami tidak diberi penyuluhan ataupun pelatihan terlebih dulu sebelum menjalankan program KBR ini. Dan kami pun tidak tau pasti pupuk mana yang digunakan pada tanaman karet karena pemerintah sama sekali tidak ada memberikan penyuluhan.”

Berdasarkan data wawancara diatas sebelum dijalankan program KBR tidak ada fasilitator yang datang memberi penyuluhan ataupun pelatihan untuk menjelaskan atau menerangkan tentang program KBR. Sementara disini peran fasilitator dinilai cukup penting dalam memberikan bantuan berupa arahan pada masyarakat desa secara langsung. Sementara itu fasilitas yang diberikan pemerintah hanya berupa pupuk dan bibit yang hanya diberikan pada awal serah terima program dilaksanakan, sebagaimana diungkapkan oleh saudara Usman salah satu Kelompok Tani Sinar Harapan Lestari di Desa Ella Hulu :

“Selain tidak ada bantuan fasilitas yang diberikan pemerintah seperti traktor yang digunakan untuk membajak sawah saja tidak ada. Sementara Kami juga mengalami kendala terkait masalah pupuk. Pupuk yang diberikan pemerintah pada awal serah terima program sudah habis. Sehingga kami mengalami kekurangan pupuk. Mau membeli pupuk sendiri harganya sudah pasti mahal, kita masyarakat desa tidak mempunyai dana untuk membeli pupuk.”

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber, pemerintah hanya memberi pupuk pada awal serah terima, yang artinya setelah itu tidak ada bantuan yang datang. hal tersebut seakan menjadi formalitas bagi pemerintah yang hanya memberikan bantuan di awal serah terima program. Pemerintah seperti melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan bantuan lagi. sementara adanya fasilitas sangat membantu masyarakat desa dalam bekerja menjadi lebih mudah. Sebelumnya dari pihak Desa sudah pernah mengupayakan untuk meminta bantuan pada pemerintah, namun belum ada tanggapan langsung dari pemerintahnya, seperti yang di ungkapkan oleh Usman salah satu anggota Kelompok Tani mengatakan :

“ kami juga sudah pernah mengirimkan proposal untuk mengirimkan bantuan berupa pupuk pada pemerintah, tetapi tidak ada satupun proposal yang sudah kami kirimkan mendapatkan tanggapan dari pemerintahnya.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan dari pihak Kelompok Tani Desa Ella Hulu untuk meminta bantuan kepada dinas dengan mengirimkan proposal. namun proposal yang mereka kirimkan tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis di atas bahwa empat faktor yang menjadi penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa keempat faktor diatas sama pentingnya. Namun menurut penulis dari keempat faktor yang sudah dijelaskan penulis berdasarkan data wawancara diatas. Ada satu faktor yang sangat mempengaruhi kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa KBR yaitu terletak pada kemampuan serta keterampilan yang tidak dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Hal itu terjadi karena masyarakat desa tidak memiliki pendidikan formal maupun nonformal yang baik.

Rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat dikarenakan tingkat pendidikan di desa-desa yang memang sangat rendah. Banyak masyarakat desa yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena beberapa faktor, diantaranya adalah dari segi ekonomi sangat banyak masyarakat desa yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena kondisi mereka yang memang sudah miskin. Serta tidak adanya faktor pendukung seperti penyuluhan yang dilakukan pemerintah ke desa-desa terkait pendidikan. Ditambah lagi masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang bertani atau berkebun. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan dengan cara tradisional atau yang diajarkan secara turun temurun.

Hal itu menjadikan kurangnya keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa menjadi faktor utama penyebab kegagalan program pemberdayaan KBR. Jika masyarakat memiliki pendidikan yang memadai tentu tidak akan sulit bagi mereka untuk memahami tata cara pengelolaan program KBR tersebut walaupun tanpa adanya penyuluhan dari pemerintah. dan jika mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan tentu mereka bisa membuat sendiri pupuk alami. Setidaknya masyarakat desa mempunyai pengetahuan dasar dalam bertani yang dapat mempermudah mereka dalam mengelola program KBR tersebut.

3.1.4 Terbatasnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa

Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan sebuah program tentu diperlukan pengetahuan dalam diri masyarakat untuk mengolah program tersebut agar berhasil. Keterampilan serta pengetahuan adalah salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan suatu program. Pengetahuan disini berpengaruh pada kinerja masyarakat desa. Pendidikan bisa menjadi pengetahuan dasar bagi masyarakat desa untuk lebih mudah memahami tentang program yang akan mereka kelola nantinya.

Karena tanpa keterampilan serta pengetahuan, program yang dijalankan tentunya akan mengalami hambatan bahkan cenderung mengalami kegagalan. Selain itu tanpa adanya keterampilan dan pengetahuan dalam masyarakat juga dapat menyebabkan berkurangnya peluang bagi masyarakat miskin yang ingin mengikuti program tersebut. banyak dari masyarakat desa yang berpendidikan rendah. Hal itu tentunya akan melemahkan program yang akan dijalankan masyarakat desa.

Menurut KASUBAG Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Melawi yaitu

Wito Mulyono, S.IP,MM :

“ Pada dasarnya penyebab kegagalan itu sendiri berasal dari masyarakatnya sendiri, contoh seperti masyarakat tidak mau belajar bagaimana cara mengolah sumber daya tersebut. Selain itu kan masyarakat tidak punya keterampilan contoh untuk menanam padi saja masyarakat masih menggunakan cara yang bersifat tradisional, seperti harus membakar lahan terlebih dahulu baru ditanam. Kalau masyarakat nya memang sudah punya keterampilan untuk mengolah bibit-bibit ini dari awal kan kita enak, tidak perlu repot. Kalau mereka paham kan bisa mengolah sendiri bibit-bibit itu, tapi kan tidak semua masyarakat yang memang sudah ada keterampilan seperti itu untuk mengolah bibit, jadi ya pasti program nya ada yang gagal” (Wawancara pada tanggal 31 mei 2018)

Menurut wawancara diatas masih banyak masyarakat desa miskin yang tidak memiliki keterampilan serta pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah program tersebut dengan baik dan benar. Sehingga program yang dijalankan pun mengalami hambatan serta tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat tidak memiliki keterampilan serta pengetahuan yang baik untuk mengelola lahan. Hal itu dikarenakan pendidikan masyarakat yang rendah. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dasar dalam memahami program

pemberdayaan. Hal ini sebenarnya bukanlah dikarenakan masyarakatnya yang tidak mau untuk melanjutkan pendidikan tetapi dikarenakan kondisi mereka yang miskin.

Rendahnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak lain juga dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dari masyarakat desa itu sendiri. Dimana hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Ella Hulu, adapun jumlah tingkat pendidikan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO	TINGKAT PEDIDIKAN	JUMLAH
1	Starata 2	1 orang
2	D4 / Starata 1	17 orang
3	D3 / Sarjana muda	-
4	D1 / D2	2 orang
5	SLTA / Sederajat	47 orang
6	SLTP / Sederajat	281 orang
7	SD / Sederajat	598 orang
8	Tidak sekolah	111 orang

Sumber: Data Prmer Kependudukan Desa Ella Hulu berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat desa Ella Hulu sangatlah rendah. Dimana kategori untuk pendidikan tingkat SD/Sederajat sebanyak 598 orang. SLTP/Sederajat sebanyak 281 orang. Sedangkan untuk golongan masyarakat yang tidak bersekolah atau tidak memiliki pendidikan sebanyak 111 orang. Hal itu dilihat dari jumlah tingkat pendidikan yang ada terdiri dari 7 kategori dari 8 kategori yang ditetapkan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tentunya sangat sulit bagi

masyarakat desa untuk melakukan perubahan mendasar terhadap pola pikir dalam menjalankan program KBR.

Dalam hal ini kemampuan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah tentu sangat terbatas dalam mengelola tanah pertanian. Meningat bahwa pengetahuan sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan suatu program. Hal tersebut membuktikan bahwa rendahnya pendidikan yang dimiliki sangatlah mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan penduduk dalam mencapai keberhasilan program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Jika suatu masyarakat tidak memiliki pengetahuan dasar maka secanggih apapun teknologi yang disediakan juga akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu pendidikan adalah hal sangat penting dalam mendapatkan pengetahuan dasar bagi masyarakat desa.

Tingkat pendidikan di suatu daerah tentu sangat berpengaruh dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan dibidang pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk Desa Ella Hulu. Karena pada zaman dulu masyarakat tidak perlu bersekolah untuk mendapatkan hasil dari bertani, karena hutan dan tanahnya masih belum terjamah sehingga banyak tanah yang masih subur. Karena kebiasaan masyarakat desa yang lebih suka mempraktekan ladang berpindah, mengakibatkan lahan yang subur makin lama makin sempit jauh dari perkampungan penduduk, sehingga lahan yang tersisa hanya tanah tandus.

Sebagian besar bahkan pengelolaannya masih bersifat tradisional, yaitu sebelum memulai penanaman bibit masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar kemudian baru ditanami dengan bibit. Kemudian masyarakat membiarkan tanaman tersebut tumbuh sendiri, tanpa diberi pupuk, hasilnya banyak tanaman liar yang tumbuh disekitar pohon karet.

Masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menanam bibit karet yang benar. Seperti yang diungkapkan oleh Abet salah satu informan petani karet yang ikut kedalam Kelompok Tani Desa Ella Hulu sebagai berikut :

“Dari pemerintah tidak ada pembinaan ataupun penyuluhan terlebih dulu sebelum program dilaksanakan. Bahkan untuk membuka lahan saja kami masih menggunakan cara lama (tradisional) yang diaarkan turun temurun oleh kakek nenek kami.”(wawancara pada tanggal 13 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat desa membuka lahan dengan cara dibakar terlebih dahulu. Yang mana kegiatan tersebut sebenarnya sangat berbahaya untuk dilakukan. Karena hal itu bisa saja menyebabkan kebakaran hutan. Dalam hal ini pengetahuan sangatlah penting untuk menentukan keberhasilan suatu program. Selain itu karet tersebut juga tidak diberi pupuk sama sekali sehingga banyak tanaman liar yang tumbuh mengelilingi pohon karet tersebut. karena pendidikan masyarakat yang rendah mereka tidak mengetahui cara untuk membuat pupuk secara alami yang harusnya bisa dilakukan jika masyarakat desa memiliki pengetahuan dasar akan hal itu.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Abet salah satu informan petani karet yang ikut kedalam Kelompok Tani Desa Ella Hulu yang menyatakan sebagai berikut :

“ Selain itu kami juga kesusahan untuk membunuh tanaman liar yang tumbuh disekitar karet, sementara bantuan pupuk diberikan hanya pada awal program tersebut diberikan oleh dinas, selanjutnya tidak ada bantuan yang datang. Karenanya banyak yang mati karena banyak semak belukar yang mengelilingi karet tersebut. Kalau tidak ada pupuk ya susah. Mau buat pupuk sendiri kami tidak mengerti bagaimana cara buat pupuknya, mau membeli sendiri harga pupuknya juga mahal, jadi ya susah kalau tidak ada pupuk.” (Wawancara pada tanggal 13 juni 2018).

Berdasarkan informan diatas gagalnya program tersebut juga salah satunya dikarenakan pihak dinas ataupun pemerintahnya tidak serius dalam memberikan bantuan pupuk. Sehingga lama-kelamaan tanaman karet ditumbuhi rumput ilalang dan tanaman liar lainnya yang semakin meninggi. Akibatnya pertumbuhan karet menjadi tidak subur bahkan tidak sedikit dari tanaman karet yang mati dan tidak bisa ditoreh.

Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab gagalnya program tersebut dikarenakan tidak adanya pemberian pupuk. Dalam usaha perkebunan karet yang terpenting

adalah pemupukan. Sementara jika ingin membeli sendiri masyarakat terkendala dengan harga pupuk yang cukup mahal. Masyarakat hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tetapi hasilnya bantuan dari pemerintah tak kunjung datang, sehingga karet tersebut mati dan tidak bisa ditoreh.

Seorang petani paling tidak harus memiliki kemampuan dasar untuk membedakan setiap jenis pupuk, bibit bahkan harus tau mana lokasi yang tepat untuk dijadikan sasaran program. Oleh karena itu pengetahuan sangat penting untuk masyarakat desa yang hendak menjalankan suatu program.